

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdy Yuhana, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Fokus Media, Bandung. Hal. 67.
- Anggara Sahya, 2014, *Kebijakan publik. Intermedia*, Jakarta.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT. RajaGrafindo Persada., Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- M. Makhfudz, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mahmud Peter, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Namdang Alamsah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Pandiva Buku, Yogyakarta.
- Nany Suryawati, 2020. *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Nuruz Zaman, 2018, *Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indoensia (Paradigma Baru Upaya Mempercepat Tujuan Negara)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama*, Yogyakarta.

Rio F. Wilantara dan Susilawati, 2016, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*, Refika Aditama, Bandung.

Sri Soemantri dkk, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia (30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sirajuddin, dkk., 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.

Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal:

Arsil, F., & Ayuni, Q. Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun 2020.

Al Faruk, M., & Pujiyanti, Y. R. Perbandingan Kebijakan Penanganan Covid-19 Antara Pemerintah Indonesia, Cina Dan Italia. *In NiCMA: National Conference Multidisciplinary* Vol. 1, No. 1., Tahun 2021.

Muhammad Syarif Nuh, Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UMI, Vol. 18, Nomor 2 Tahun 2011.

Pratama, D. N. P. B. Y., & Resen, M. G. S. K. . Pengaturan Batas Waktu Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Tahun 2021.

Prasetio, R. B. (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), Tahun 2021.

Ristyawati, A. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Tahun 2020.

Telaumbanua, D. Tinjauan Yuridis Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19. *Jurnal Education and development*, Tahun 2020.

Wieke, D. S. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 dan PP Nomor 21 Tahun 2020. *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. Tahun 2021.

Peraturan-peraturan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 *tentang Keekarantinaan Kesehatan*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 *tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 *tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).*

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 *tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 *tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional*

Situs Internet:

<https://dinkes.gorontalo.gov.id/who-tetap-kan-covid-19-sebagai-pandemi/>, diakses tanggal 30 november 2021.

<https://www.prudential.co.id/>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2021.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> . Pada Tanggal 3 Desember 2021.

<https://kbbi.lektur.id/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2021.

<https://www.beritasatu.com/politik/854291/pakar-meski-masa-darurat-diaktivasi-masa-jabatan-presiden-tidak-serta-merta-bisa-diperpanjang>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

<https://news.unair.ac.id/2020/12/07/penanganan-coronavirus-di-italia-respon-dan-strategi/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

<https://video.medcom.id/medcom-internasional/8KyJ113N-italia-akan-hentikan-darurat-covid-19-mulai-31-maret>, diakses pada tanggal 14 juni 2022.

